BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk kedalam negara yang memiliki keberagaman akan sumber daya manusianya. Oleh karenanya, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maksud dari tujuan awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keturunan dan pertumpahan darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum rakyat. Setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi yang telah menjadi bagian warga negara tersebut, karena pada dasarnya negara harus menjaga mereka tetap aman, memajukan kesejahteraan, dan juga melindungi mereka dari kemiskinan. Namun, nilai kualitas sumber daya manusia dapat mempertahankan kemiskinan. Jika negara memiliki kualitas pembangunan sumber daya manusia yang sangat rendah, hal tersebut akan berimbas kepada pendapatan per kapita yang rendah pula, yang mana pendapatan perolehan yang sangat minimum akan berimbas pula pada peningkatan pertumbuhan orang miskin (Hakim dkk, 2023 : 1396).

Sejak berdirinya Indonesia pada tahun 1945, masalah kesejahteraan telah menjadi agenda nasional yang tampaknya belum kunjung selesai. Kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak kunjung meningkat, justru menimbulkan penilaian rata-rata yang jauh dari kata memuaskan serta tingkat penyebaran kemiskinan saat ini masih menjadi isu sosial yang belum tuntas. Khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan ini menjadi salah satu masalah sosial yang kompleks dan menjadi tantangan utama

dalam pembangunan ekonomi. Meskipun berbagai upaya sudah mulai dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengurangi tingkat kemiskinan, masalah ini masih tetap ada dan membutuhkan perhatian lebih (Damanik dkk, 2025 : 110).

Salah satu penyebab suatu negara mempunyai angka kemiskinan yang tinggi adalah karena rendahnya suatu kesempatan kerja yang terdapat di area wilayah sekitar. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi, dengan populasi penduduk hingga mencapai lebih dari 280 juta jiwa didalamnya. Seperti yang diketahui, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Merujuk ke dalam regulasi tersebut, setiap dari warga negara memiliki hak untuk mendapatkan sebuah pekerjaan sehingga mereka dapat hidup berdasarkan kebutuhannya. Namun, kurangnya peluang dapat bekerja di negara sendiri dan ketatnya persaingan dalam pasar tenaga kerja serta adanya peluang untuk mendapatkan upah yang besar di luar negeri, membuat banyaknya masyarakat Indonesia melakukan pekerjaan dan mencari kekayaan di luar negeri, sehingga menyebabkan para pencari kerja tersebut bermigran atau biasanya disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (yang kemudian dikenal sebagai TKI) (Salam, 2018 : 97).

Tidak banyak orang yang mengetahui apa itu Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Buruh Migran Indonesia (BMI). Istilah umum yang biasa digunakan adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dimaksudkan juga untuk warga negara Indonesia yang telah bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan untuk menerima

persyaratan. “migran” yang memiliki makna sebagai orang yang melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan melakukan pekerjaan di negeri tersebut dan menerima upah disana (Melina, 2018 : 146).

Melihat situasi terkini, terdapat satu cara untuk menanggulangi kekurangan lapangan kerja di dalam negeri yaitu dengan melakukan mengirim pekerja untuk melakukan migran ke luar negeri. Cara tersebut dianggap menjadi salah satu alternatif untuk mendukung upaya pembangunan nasional dalam mengatasi pengangguran. Peraturan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yaitu Nomor PER-19/MEN/V/2006, yang mengatur pelaksanaan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri, telah mengatur mekanisme penempatan karyawan dari dalam negeri untuk luar negeri. Keputusan dari Menteri Tenaga Kerja tersebut dianggap menjadi salah satu bentuk mitigasi dalam hal menanggulangi permasalahan sosial tentang pengangguran ini.

Di Indonesia, permasalahan TKI sudah ada sejak awal adanya di Indonesia. Pekerja migran biasanya mendapat rujukan dari agen tenaga kerja yang telah terdaftar di negara namun tak menutup kemungkinan beberapa ada yang menggunakan jasa agen ilegal. Agen TKI menangani hampir seluruh proses yang dibutuhkan oleh para TKI, adapun yang akan diurus oleh agen tersebut biasanya dimulai dari tahap awal, penempatan para pekerja, pengajuan permohonan untuk mendapatkan paspor dan visa sesuai negara yang dituju, pelatihan karyawan, transportasi berikut akomodasi, dan tempat karyawan akan ditempatkan dalam pekerjaan di masa yang akan mendatang. Banyak dari TKI yang tidak memiliki pengalaman untuk pergi ke luar negeri, dibina oleh calo atau

makelar yang mengunjungi desa mereka dengan iming-iming menggunakan upah tinggi, peluang karir yang beragam, dan membantu memfasilitasi proses tersebut (Harefa dkk, 2023 : 2).

Sebuah perusahaan yang beroperasi sebagai penampung penempatan para karyawan migran haruslah memiliki surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia yang dikeluarkan dari kementerian terkait dan tidak diperkenankan untuk melakukan penempatan sendiri tanpa pemberitahuan informasi yang jelas kepada negara. Perusahaan dari penempatan tenaga kerja migran indonesia yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah akan mendapatkan tindakan cepat dari negara yaitu negara akan mencabut surat izin dari perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Tetapi karena hal ini juga banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi muncul, terlebih pekerja biasanya tidak mengetahui informasi yang cukup tentang pengiriman penyalur tenaga kerja lokal dan juga tenaga kerja migran sesuai yang tertuang di dalam peraturan yang berwenang (Yasmine, 2019 : 1598).

Hal tersebutlah yang mendorong banyak ditemukannya TKI yang dikerahkan sebagai tenaga di luar negeri namun tidak mendapat perlakuan maupun perlindungan yang tertulis pada lembar halaman perjanjian kontrak dan penempatan TKI mereka. Mereka tidak menerima upah sesuai ketentuan yang dijanjikan, diberangkatkan secara sewenang-wenang, ada yang tidak mendapatkan pekerjaan yang disepakati setelah sampai di tempat tujuan, dan ada pula yang tertipu dan dijadikan korban perdagangan manusia. Kenyataannya, tidak semua impian dan keinginan bisa terwujud dengan baik. Oleh karena itu

kerap banyak dialami sebagian para tenaga kerja yang melakukan migran ke luar negeri dan menghadapi permasalahan di sana. Sehingga hal ini termasuk dalam penipuan karena tidak sesuai hal yang dijanjikan diawal oleh jasa atau agen penyalur yang mengirim TKI ke negara-negara tersebut (Situmorang dkk, 2021 : 674).

Dalam hal ini, agen atau jasa yang akan melakukan tindak pidana penipuan pastinya memiliki niat yang dimana sudah pasti niat ini adalah sifat melawan hukum. Oleh karena itu, untuk menekan tingkat kejahatan atau pelanggaran yang tinggi, upaya penanggulangannya sangatlah penting. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan dalam proses penghukuman dan upaya antisipasi lainnya. Hukum sangat perlu ditegakkan untuk melaksanakan tujuan dan juga cita-cita bangsa Indonesia dan seperti yang diketahui bahwa Indonesia juga dikenal sebagai negara yang berlandaskan hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa tujuan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah: a). menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan b). menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Pasal 4 KUHP, yang berisikan bahwa setiap Negara yang berdaulat memiliki hak untuk melindungi kepentingan hukumnya, sekarang juga mengakomodasi perlindungan pekerja migran Indonesia. KUHP nasional yang baru juga memasukkan asas proteksi dan nasional pasif.

Pada dasarnya, Pasal 5 KUHP, yang mengatur asas nasional pasif dan perlindungan, mengungkapkan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) masuk

ke dalam kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu ketentuan pidana pada undang-undang bisa dikenakan pada mereka yang melanggar. Adanya perlindungan hukum tersebut memiliki misi untuk memenuhi hak asasi pekerja migran Indonesia yang harus didapat dengan adil dan melindungi mereka dari pelanggaran hukum ketika mereka menjadi karyawan di luar negeri.

Adapun kebutuhan untuk memaksimalkan dan menyempurnakan usaha yang dijalankan untuk meringankan kesulitan yang dihadapi pekerja tenaga kerja internasional supaya para tenaga kerja dapat bekerja dengan layak dan semestinya, melindungi hak asasinya, dan merasakan hasil kerja mereka sepenuhnya. Selain itu, keselamatan pekerja migran masih kurang optimal dalam dilindungi (Ratnasari dkk, 2023 : 43). Sebagai aparat penegak hukum mereka juga perlu memberi contoh nyata akan adanya pengayoman pada masyarakat sebab hal tersebut juga berdampak pada kepatuhan masyarakat terhadap peraturan atau regulasi yang telah berlaku. Polisi Republik Indonesia sendiri merupakan bagian dari sistem penegakan hukum Indonesia. (POLRI) (Herman dkk, 2024 : 119).

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, POLRI berfungsi menjadi pelindung, mengayomi, dan pelayan masyarakat serta aparat penegak hukum. Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran, aparat penegak hukum dan keamanan harus membantu dalam hal pelayanan untuk memberikan keamanan baik secara fisik maupun keteguhan jiwa terhadap korban dan saksi dari beragam ancaman yang datang, gangguan,

serta kekerasan fisik maupun mental dari orang ketiga. Sementara itu, pandangan hukum pidana umum tentang tindak pidana adalah serangan terhadap individu, masyarakat, dan hubungan sosial. Ini sebabnya, kejahatan menimbulkan kewajiban untuk memperbaiki hubungan rusak yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Oleh karena itu, aparat kepolisian di sini sangat penting untuk membantu memperbaiki hubungan rusak yang disebabkan oleh tindak pidana.

Aparat penegak hukum atau kepolisian yang berwenang untuk membantu jalannya penyidikan sampai akhir penyelesaian ini menunjukkan suatu nilai dari keadilan, namun biasanya bentuk dari keadilan yang akan dicapai bisa memiliki perbedaan, ada yang melalui *restorative justice* atau memang harus melalui persidangan. Kedua perbedaan tersebut akan terpampang jelas ketika proses telah dilakukan dan akan kembali terlihat dalam hasil akhir mufakat, hal-hal seperti ini yang diupayakan pihak kepolisian untuk membantu masyarakat mendapatkan keadilannya (Apriyanto, 2016 : 56).

Sebuah undang-undang nasional seharusnya dapat mengontrol kehidupan bangsa dan bermanfaat bagi semua orang. Hal ini terutama berlaku untuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang memberikan perlindungan pemerintah Indonesia kepada tenaga kerja Indonesia yang menjadi karyawan atau tenaga di luar negeri. Terdapat sebuah cara untuk melindungi para TKI yang mana bisa melakukan perlindungan terhadap kepentingan para calon TKI, demikian dilakukan untuk memastikan hak yang harus diperoleh oleh TKI memiliki jaminan hukum sebelum, selama, dan setelah mereka bekerja di luar negeri. Akibatnya, peraturan undang-undang ini diharapkan bisa menjadi sebuah

keuntungan bagi warga negara Indonesia, khususnya para tenaga kerja internasional yang memiliki status sebagai tenaga kerja di luar negeri.

Pelaksanaan mengenai ketenagakerjaan khususnya pada Kabupaten Buleleng masih memiliki banyak kekurangan. Sebagai wilayah yang penduduknya banyak memilih sebagai pekerja migran, Kabupaten Buleleng belum mempunyai regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan terhadap ketenagakerjaan yang memilih bekerja di negara luar. Sementara itu pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Buleleng berjumlah banyak dan menaruh harapan akan bekerja diluar negeri yang dimana hal ini bisa menjadi sasaran terhadap tindak penipuan yang dilakukan oleh jasa atau agen penyalur.

Per Juni 2025, ada 2.245 warga Kabupaten Buleleng yang berstatus sebagai tenaga kerja migran, tercantum dalam data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Buleleng. Dari data yang diberikan oleh Kepala Disnakertrans kabupaten Buleleng yaitu Drs. Komang Sumertajaya yang sebagai Pembina Utama Muda itu mengatakan pada setiap tahunnya pekerja migran asal Buleleng rata-rata mencapai angka ribuan, hal ini dikarenakan kondisi yang membaik setelah covid-19 dan tenaga kerja memilih untuk berangkat keluar negeri. Keberangkatan ini mencakup pekerja pada kapal pesiar dan kegiatan yang dilakukan di darat seperti tenaga rumah tangga, spa, dan restoran. Dari 2.245 orang yang terdaftar secara hukum melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Bali dan data berupa jumlah Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang dikeluarkan oleh BP3MI Bali, terdiri dari 1.004 laki-laki dan 1.241 perempuan.

Mengetahui di setiap tahunnya wilayah Buleleng selalu mengalami peningkatan yang pesat terhadap minat untuk menjadi tenaga kerja Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng bertindak cepat untuk terus menerus memberikan arahan dan sosialisasi tentang menjadi tenaga kerja Indonesia yang memiliki keberangkatan bekerja yang legal. Sehingga dalam beberapa tahun kemudian ketika para tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Buleleng mengalami sebuah musibah yang menimpa dirinya dan masih memiliki keterikatan kontrak kerja dengan perusahaan yang bersangkutan, Dinas setempat akan langsung menangani permasalahan kasus tersebut. Namun walaupun sosialisasi terus diberlangsungkan, masih terdapat masyarakat yang memilih untuk berangkat menggunakan agen ilegal atau tidak sah yang tidak tercatat dalam negara, sehingga pemerintah setempat sangat sulit menangani hal tersebut ketika sang tenaga kerja sedang terkena musibah ketika berada di luar negeri. Hal ini terutama sangat sering terjadi kepada para tenaga kerja Indonesia yang memilih untuk bekerja sendiri tanpa melibatkan agen resmi dari Indonesia. Oleh karena itu, para TKI tersebut kadang-kadang datanya tidak dapat tervalidasi di BP3MI yang mana sarana terakhir bagi WNI untuk melanjutkan pekerjaan ke luar negeri.

Adapun kewenangan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap pekerja migran tetapi regulasi ini tidak berjalan dengan lancar pengimplementasiannya, oleh karena tersebut banyak pekerja TKI seperti kontak terputus, tertahan di imigrasi dan berakhir tidak bisa kembali ke tanah air karena paspor atau visa yang sudah tidak berlaku, ditempatkan di tempat yang tidak resmi, *scam*, penuntutan kepada TKI untuk mengganti kerugian kepada

perekrut, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, sakit dan meninggal dunia. Dengan adanya pekerja *illegal* ini, menjadi sulit untuk mengetahui data jika terjadi masalah dikarenakan pemerintah tidak memiliki data. Jika ingin berangkat mandiri, maka warga harus memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan perekrut kemudian akan dilegalisir oleh pihak berwajib yaitu kedutaan Indonesia yang berlokasi pada daerah tinggal untuk mendaftarkan diri, sehingga bisa terdaftar dan tercatat secara resmi di BP3MI. (Yuliantini dkk, 2020 : 27).

Bahkan dalam data di Kabupaten Buleleng terlapor dua tahun terakhir ada saja yang mengalami tindakan penipuan terhadap warga Buleleng yang melakukan pekerjaan migran. Pada September 2024, terdapat kabar bahwa dua TKI yang berasal dari Buleleng yang menjadi sasaran korban perdagangan manusia di negara Myanmar. Mereka pergi ke luar negeri dengan *illegal* dengan iming-iming pekerjaan yang menjanjikan, awalnya mereka tergiur gaji tinggi untuk bekerja di Thailand tetapi malah diselundupkan ke Myanmar dan setibanya mereka di Myanmar, mereka mengalami eksploitasi. Dikabarkan, bahwa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berlokasi di Myanmar untuk memulangkan kedua korban tersebut (Kompas.com, 2024).

Dengan demikian, diharapkan bahwa melalui latar belakang yang telah disusun, penelitian ini dapat menjelaskan secara menyeluruh mengapa penelitian yang dilakukan mengenai perlindungan hukum pada korban penipuan tenaga kerja di luar negeri yang dilakukan oleh agen penyalur ini merupakan masalah yang mendesak dan harus kita kaji. Latar belakang ini memberikan landasan

yang kuat bagi penelitian lebih lanjut yang menggali lebih dalam aspek penipuan, kerangka hukum yang ada, fakta lapangan serta tantangan dan peluang dalam mencapai perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan untuk menyajikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM DI KABUPATEN BULELENG”**

Dalam penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yaitu menentukan jenis perlindungan yang diberikan kepada korban penipuan pekerja migran Indonesia..

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut merupakan analisis hasil dari latar belakang yang digunakan untuk menentukan identifikasi masalah yang lebih lanjut dibahas pada penelitian ini:

1. Adanya tawaran terkait gaji dari oknum penyalur untuk mengajak korban-korban ikut kedalam ketenagakerjaan keluar negeri
2. Terdapat agen *illegal* yang tidak memiliki ijin resmi dan tidak terdaftar memiliki modus untuk menarik dengan cara memberikan iming-iming visa holiday untuk dokumen keberangkatan
3. Terdapat kerugian materiil yang dialami oleh korban karena ditipu oleh oknum penyalur

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memastikan bahwa masalah yang dibahas tidak melampaui cakupan penelitian ini, penulis telah membatasi masalah dengan hanya meneliti terkait aspek-aspek yang mengarah pada konteks khusus dan elemen-elemen yang akan dibahas lebih mendalam terutama pada cakupan perlindungan

hukum dan penanganan yang bisa ditindaklanjuti oleh pihak instansi terkait yang melakukan perlindungan terhadap korban penipuan tenaga kerja keluar negeri di kabupaten buleleng yang digerakkan oleh oknum penyalur.

1.4 Rumusan Masalah

Dalam hasil uraian latar belakang yang telah dijelaskan pada sub poin bab sebelumnya, adapun permasalahan yang bisa dirumuskan adalah seperti berikut:

- 1) Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan tenaga kerja ke luar negeri oleh agen penyalur?
- 2) Bagaimana peran dari instansi terkait di Kabupaten Buleleng dalam membantu menindak kasus tersebut?

1.5 Tujuan Penelitian

Hakikatnya, tujuan penelitian memiliki maksud untuk mencari serta menguji penelitian tersebut untuk dicarikan kebenarannya. Menemukan sesuatu dengan tujuan menghasilkan informasi pengetahuan yang baru diketahui, dan mengembangkan bermakna memperluas relasi dalam hal untuk mempelajari lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tujuan penelitian menggariskan dengan tegas permasalahan yang akan dicarikan jawabannya melalui kegiatan penelitian yang direncanakan untuk dilaksanakan. Tujuan penelitian yang jelas akan sangat memudahkan memecahkan permasalahan yang diteliti (Herlinda dkk, 2010 : 20). Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh korban tenaga kerja yang terkena penipuan oleh agen penyalur yang ada.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui lebih dalam dan jelas mengenai bagaimana Perlindungan yang didapatkan oleh Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran dari pihak instansi terkait dalam menindak sekaligus menyelesaikan kasus-kasus terkait penipuan yang dilakukan oleh agen penyalur.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan terkena tindak pidana penipuan oleh oknum agen penyalur. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menghasilkan 2 (dua) manfaat: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oleh karenanya, penelitian ini menjadi harapan untuk bisa menghasilkan beberapa manfaat berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti berharap dapat mengingatkan beragam jawaban pertanyaan yang diteliti, yaitu apakah ada perlindungan hukum untuk korban penipuan tenaga kerja migran yang disabotase oleh oknum agen penyalur di kabupaten Buleleng. Selain itu, dalam penelitian ini memiliki misi tujuan meningkatkan pengetahuan baru tentang hukum yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharap membawa jawaban dari berbagai pertanyaan yang diteliti, yaitu apakah ada perlindungan hukum untuk korban penipuan pegawai yang bekerja di luar negeri yang dilakukan oleh agen penyalur di kabupaten Buleleng. Selain itu, tujuan penelitian untuk mengkaji ulang bagaimana sistem hukum yang sudah berlaku sejak lama di Indonesia..

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk mendorong orang untuk bebas menjalani hari bersama keluarga mereka tanpa khawatir bahwa seseorang akan menipu mereka.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu penegak hukum dalam menangani kasus dan membantu korban dalam menyelesaikan masalah mereka. Ini akan membantu penegak hukum memberi hukuman yang setimpal dan sesuai dengan pelaku yang melakukan tindakan kriminal dan asusila sekalipun.